

Dialektika Reformasi Sistem Pendidikan di Era Turki Modern

Saepudin Mashuri

Dosen Jurusan Tarbiyah pada STAIN Datokarama Palu

Abstract:

This article deals with the reformation of education system in a modern Ottoman era which started since Mahmud II periods untill democratic party period. Dialogue about an education reformation in a modern Ottoman era always takes place in policy of a hegemony. In Tanzimat period, the education reformation is based on western liberalism with modernization issue in science and technology. In Young Ottoman period, Islam is regarded as part of Ottoman nationality. Therefore, Islamic and Arabic must be into national curriculum. The highest reformation of education system is in Attaturk period that is radically directed to European education system, both in institution and curriculum. Then, in democratic party period through democratic education system that permites Islam and Arabic are taught at school dan university.

Kata Kunci: Reformasi, Liberal, Sekuler, Mengadopsi, Pendidikan Modern

PENDAHULUAN

Turki merupakan negara Islam kedua setelah Mesir yang memiliki dilektika historis yang sangat spektakuler dalam kajian Pendidikan Islam. Turki tidak hanya sukses dalam membangun *imege* politisasi pendidikan dalam internal negaranya, tetapi juga sukses mengadopsi kemajuan sains dan teknologi Eropa sebagai *modeling* untuk mereformasi sistem pendidikannya. Dalam konteks ini, Hodgson (1974: 249), mengatakan bahwa *Western Turk* terbilang cukup sukses dalam menemukan dasar-dasar yang *viable* untuk membangun *national self definition* yang terkristalisasi dalam sebuah *westernizing form*. Mereka mendefinisikan diri sebagai bangsa Eropa, sebab tak satupun wilayah Islam yang mengadopsi westernisasi se “ekplisit” dan “seutuh” Turki, baik di bidang politik, sosial, ekonomi termasuk dalam bidang pendidikan.

Sejak awal abad ke 17, di kalangan rezim Utsmani telah terjadi dialektika historis tentang tehnik pemulihan integritas politik negara dan kekuatan militernya. Dari dialektika ini, menurut Ira M. Lapidus (1999: 72), maka muncullah dua *mainstream* pemikiran, yaitu; Pertama, kaum *restorasionis* yang menghendaki perlunya kembali ke undang-undang (qanun) *Sulayman-i Al-Qanun-i* dan menentang setiap pembaharuan yang memberikan kesempatan kepada Eropa dan Kristen atau bahkan membuka kesempatan bagi supremasi Eropa dan Kristen atas diri umat Muslim. Kedua, kaum modernis yang menghendaki adopsi metode Eropa untuk pelatihan, pengorganisasian, administrasi militer, perubahan sistem pendidikan dan ekonomi untuk kepentingan sipil yang dapat digunakan untuk mendukung tegaknya

negara Turki modern. Sepanjang abad ke 18 dan 19 kedua sudut pandang ini selalu terlibat dalam pergumulan dialektika yang cukup intens, tetapi dapat dikatakan bahwa paradigma pemikiran kaum modernislah yang lebih dominan.

Dialektika historis tentang pembaharuan pendidikan di Turki mengalami dinamika dan dialektika yang terus bergulir dari masa ke masa, dan hampir setiap perkembangan pendidikannya tidak pernah lepas dari *policy* sang penguasa. Titik puncak modernisasi pendidikan di Turki adalah pada masa Mustafa Kemal Attaturk yang membawa reformasi sistem pendidikannya pada titik sekularisme, sehingga mendapatkan banyak kritikan, bahkan kecaman dari lawan politik dan kaum konservatif di tingkat *grassroot*. Dinamika dan dialektika historis modernisasi pendidikan di Turki ini menjadi cukup menarik di kalangan pemerhati Pendidikan Islam sampai dewasa ini, sehingga mempatkan isu ini sebagai kajian yang selalu *survive* dan ingin dipahami oleh umat Islam.

Adalah tulisan ini berusaha mengkaji dialektika historis modernisasi pendidikan di Turki menuju Turki modern melalui upaya reformasi sistem pendidikan, agar umat Islam mengetahui realitas dan problematika pendidikan dari negara yang pernah mengklaim dirinya sebagai bagian dari Eropa. Pokok masalahnya adalah bagaimana dialektika historis reformasi sistem pendidikan di Turki seiring dengan kebijakan politik penguasanya dari masa ke masa?

REFORMASI PENDIDIKAN MENUJU TURKI MODERN

1. Pendidikan Periode Tanzimat (1839-1876 M)

Menurut Yusran Asmuni (1996: 15), pembaharuan di Turki Utsmani abad ke 19 sama halnya dengan pembaharuan di Mesir, yang juga dipelopori oleh kaum penguasa. Kalau di Mesir kita mengenal Muhammad Ali Pasya, maka di Turki hadir Sultan Mahmud II. Pada masa pemerintahan Mahmud II (1808-1839) program reformasi dalam segala aspek benegara dan kehidupan masyarakat Turki dihidupkan kembali. Dalam hal ini, Ira M. Lapidus mengungkapkan, setelah kekuasaannya sebagai pusat pemerintahan bertambah kuat, ia mulai melakukan usaha-usaha pembaharuan di bidang militer, organisasi kerajaan, dan pendidikan, meskipun proyek pembahruannya banyak bersandarkan pada program reformasi yang telah dilaksanakan Salim III.

Sebelum Mahmud II, pada masa kekuasaan Salim (1789-1807 M) telah dilakukan reformasi komprehensif, yang disebut *Nizam-i Jedid*. Program ini menghendaki reformasi pasukan militer modern, meningkatkan pendapatan sektor pajak dan pendirian sekolah tehnik untuk mendidik kader-kader rezim baru. Sayangnya program ini mendapatkan perlawanan dari kalangan ulama dan Jennisari, bahkan ia terguling pada tahun 1807.

Namun terlepas dari itu, menurut analisa Lapidus program reformasi Mahmud II dimaksudkan untuk mempertahankan otoritas absolut penguasa. Ungkapan senada juga diberikan Szyliowics (2001: 169) reformasi yang dijalankan Mahmud II banyak dilandasi keinginan untuk memperkuat posisi dan menghilangkan sumber-sumber yang berpotensi menentangnya serta menjaga kekhalfahan dari ancaman luar,

khususnya dari Muhammad Ali yang hampir berhasil menggulingkan dinasti Utsmani seandainya tidak ada campur tangan Eropa.

Walaupun demikian, menurut (Asmuni: *Ibid*, 18) upaya reformasi ini merupakan *starting point* yang lebih baik untuk membuka ruang baru upaya pembaharuan yang lebih fundamental. Kondisi ini terlihat pada *ghirah* besar Mahmud II dalam menghancurkan seluruh kekuatan *Gernisum Jennisari* dan membentuk Korp Tentara Baru. Seiring dengan itu, ia juga memecat sebagian pejabat negara yang feodal, posisi ulama diperlemah melalui perampasan sejumlah tanah wakaf, pengadilan, sekolah-sekolah untuk diserahkan ke kementerian negara, dan thariqat Bekhtashi dibubarkan, maka sejak saat itu hampir tidak ada oposisi.

Tak heran, ada beberapa program pendidikan pada masa Mahmud II yang sangat *military orientation*, antara lain; pendirian akademi militer untuk melahirkan tentara yang profesional dan loyal pada negara, program pengiriman kader militer dan angkatan laut ke berbagai ibu kota di Eropa tahun 1827 yang akan menjadi petinggi militer, pendirian sekolah medis yang bertujuan mencetak dokter bagi tentara, pendirian sekolah musik yang bertujuan untuk mendidik para tentara agar memiliki kecakapan dalam bermain drum, terompet, gitar, biola, dan alat musik lainnya. Sementara pendirian sekolah tehnik dan biro penerjemahan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga birokrasi yang cakap dalam pemerintahan.

Pada aspek kurikulum Mahmud II juga melakukan pembaharuan dengan memasukkan mata pelajaran umum, sebab ia menilai sistem madrasah yang praktis hanya mempelajari ilmu yang terkait dengan agama *ansich* tidak mampu menciptakan *output* yang bermental *reformism* dan *uncapable* untuk menempati posisi-posisi kemeterian baru atau di bidang pemerintahan lainnya. Disamping itu, ia mendirikan sekolah *Maktab-i Ma'arif* untuk menghasilkan tokoh-tokoh pembaharu dan *Maktab-i Ulumu Adab-i* sebagai pusat penerjemahan karya-karya sains Eropa. Kemudian, untuk mensosialisasikan ide-ide pembaharuan dan pendidikan bagi masyarakat sipil, Mahmud II mendirikan surat kabar resmi, yakni *Takvim-i Vikayi* sebagai corong penguasa yang langsung berada di bawah kendali negara.

Reformasi fase pertama yang dilaksanakan Mahmud II, kemudian ditindaklanjuti oleh penguasa Tanzimat (1839-1876) dengan tokoh-tokohnya, yaitu; Mutafa Rasyid Pasya, Mustafa Sami, Mehmed, dan Ali Pasya. Pembaharuan di bidang pendidikan yang paling spektakuler pada masa Tanzimat adalah pendirian Sekolah Galatasaray (*Galatasaray Lycee*) dan *Mulkiya*.

Menurut Szyliowics (*Ibid*, 181), kedua sekolah ini berperan sebagai agen sosialisasi gagasan dan ide-ide modern, bahkan revolusioner. Jika peranan *Galatasaray* hanya terbatas pada pembentukan kelompok menengah profesional dan cendekiawan yang terbuka dengan gagasan dan nilai-nilai modern, tetapi *Mulkiya* justru mempersiapkan siswa untuk menjadi elit pemerintahan sehingga lulusannya dominan menempati posisi strategis sebagai petinggi negara (birokrat) yang bertanggungjawab terhadap pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan yang terkait dengan kekhalifahan dan republik. Sekolah *Galatasaray* memberikan program

pendidikan umum dalam bahasa Prancis, dimana siswa Islam dan non-Islam duduk berdampingan secara damai.

Meskipun upaya pembaharuan dalam bidang pemerintahan, sosial, hukum, dan pendidikan pada masa Tanzimat ini banyak mendapatkan kritikan dan kecaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan Utsmani, karena gerakan-gerakannya yang banyak didasari oleh Liberalisme Barat yang dinilai meninggalkan pola Syariat Islam, sikap otoriter sultan dan menteri-menterinya, dan pemberantasan Jennisari dan thariqat *Bekhtasyi*. Namun harus diakui bahwa pembaharuan di bidang pendidikan, khususnya *output* Sekolah *Galatasaray* dan *Mulkiya* banyak memberikan pencerahan bagi perkembangan Turki modern. Pada masa ini kekuatan Turki Utsmani telah berpindah ke kalangan birokrat (*memur*), penerjemah, dan pejabat pemerintah yang terdidik di sekolah sekuler dan ulama yang berparadigma pembaharuan.

2. Pendidikan Periode Konstitusi (1876-1921 M)

Golongan intelegensia Kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut Sultan Abdul Hamid dikenal dengan nama Utsmani Muda (*Yeni Utsmanlilar Young Ottoman*). Pemikiran-pemikiran yang disuarakan Utsman Muda dan Turki Muda banyak mempengaruhi pembaharuan yang dilakukan sesudah era Tanzimat atau tepatnya di era konstitusi ini. Para tokoh Utsmani Muda antara lain; Ziya Pasya, Midat Pasya, Namik Kemal, Ibrahim al-Syinas, dan Ali Sefkati. Mereka dengan gigih berupaya menggulingkan sultan yang absolut dan memperjuangkan tatanan pemerintahan konstitusi yang lebih demokratis, walaupun mereka mengalami kegagalan, bahkan mereka hilang dari arena pembaharuan karena harus melarikan diri ke luar negeri, ditawan, dan dihukum mati oleh sultan Abdul Hamid, seperti Ali Sefkati. Selanjutnya Turki Muda (*Young Turk*) muncul sebagai reinkarnasi dari Utsmani Muda (*Young Utsmani*) melakukan gerakan revolusioner yang akhirnya menghasilkan revolusi tanggal 23 Juli 1908 dengan membentuk pemerintahan konstitusi.

Meskipun Abdul Hamid diklaim oleh banyak sejarawan sebagai penguasa yang otoriter dan tidak berpandangan pembaharuan, namun menurut analisa Harun Nasution (1975: 116-117) di zaman pemerintahannya yang absolut, terjadi pula beberapa pembaharuan, yaitu;

- a. Dalam bidang pendidikan, ia mendirikan sejumlah perguruan tinggi, antara lain; Sekolah Tinggi Hukum (1878), Sekolah Tinggi Keuangan (1878), Sekolah Tinggi Seni (1879), Sekolah Tinggi Dagang (1882), Sekolah Tinggi Tehnik (1888), Sekolah Tinggi Hewan (1889), Sekolah Tinggi Polisi (1891), dan Universitas Istanbul (1900). Sedangkan menurut Abuddin Nata (2004: 289), pada masa Abdul Hamid juga didirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah yang baru. Untuk mengatasi kebutuhan tenaga guru dibuka pula sekolah-sekolah guru. Kaum wanita bebas memilih sekolah, hingga bermunculan dokter-dokter dan hakim-hakim wanita. Perubahan juga menjalar ke pola berpakaian pria dan wanita dengan ala Eropa.
- b. Dalam bidang hukum, ia mendirikan Mahkamah Non-Agama dan membentuk Kementerian Kehakiman.

- c. Dalam bidang transportasi, ia membangun akses perhubungan darat, laut, pos dan telegraf yang semakin luas.
- d. Dalam bidang publikasi dan percetakan buku semakin ditingkatkan sejalan dengan semakin bertambahnya minat membaca di kalangan masyarakat meskipun selalu mendapat pengawasan ketat dari negara.

Kerajaan Utsmani di bawah kekuasaan Turki Muda berjalan dalam sistem pemerintahan konstitusi yang lebih demokratis. Kerana itu, tidak heran jika pembenahan pendidikan di era ini berlangsung lebih signifikan daripada era sebelumnya. Menurut Szyliowics (*Ibid*, 206-209), di bawah Turki Muda banyak melakukan reformasi sistem pendidikan, antara lain;

- a. Pembenahan pada universitas yang didirikan oleh Abdul Hamid dengan memindahkan kampus utamanya ke daerah yang lebih strategis dan menyusun kembali kurikulum dengan memasukkan kembali mata kuliah sosiologi, sejarah, dan filsafat yang sebelumnya dilarang oleh sultan Abdul Hamid.
- b. Menetapkan hukum pendidikan dasar wajib (1913)
- c. Menambah pembangunan gedung sekolah
- d. Menetapkan sekolah dasar barada di bawah arahan dan bimbingan Menteri Pendidikan Sekuler (1916)
- e. Membuka pendidikan bagi kaum wanita di semua jenjang pendidikan.

Salah satu tokoh Turki Muda, yaitu Ziya Gokalp yang mengaggap Islam sebagai bagian integral dari budaya nasional, sehingga dari sudut pandang pendidikan, maka bahasa Turki, sastra, sejarah Islam, ilmu agama, dan bahasa Eropa harus masuk dalam kurikulum pendidikan di Turki, meskipun di sisi lain, ia lebih menyukai bentuk negara sekuler bagi Turki.

3. Pendidikan Periode Republik (1921-1948 M)

Turki pada periode ini menikmati kepemimpinan seorang Mustafa Kemal Attaturk yang mempunyai visi, keberanian, dan kemampuan yang membawa sebuah negara baru keluar dari sisa-sisa kekhalifahan, bahkan mampu menapak jalur modernisasi sampai titik sekulerisme. Walaupun memiliki banyak kelemahan di berbagai bidang, Attaturk mampu menciptakan struktur negara Turki modern yang sekuler dan mampu mensosialisasikan kebijakan politiknya. Era pembaharuan Attaturk dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu; Pertama, era tahun 20-an, penekannya pada penyusunan struktur negara modern termasuk yang berkaitan dengan pendidikan. Kedua, era tahun 30-an, terfokus pada pembangunan ekonomi dan transformasi perubahan sosial budaya.

Deru roda modernisasi dan sekularisasi pada era Attaturk dalam bidang pemerintahan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan terus bergumuruh dan berlangsung sangat cepat. Perompakan menyeluruh sistem pemerintahan dari *Theoratic Empire* menjadi Negara Kebangsaan Modern menjadi muara akhirnya Attaturk. Semboyan yang digaungkan adalah ajaran-ajaran Nasionalisme Sekuler menggantikan ajaran Islam.

Muhaimin dkk (1999: 81) mengatakan bahwa suka tidak suka perombakan yang bersifat radikal dan maraton tersebut berjalan terus, setahap demi setahap.

Kesultanan dihapuskan pada tahun 1922, digantikan dengan proklamasi Republik tanggal 29 Oktober 1923. Pada tanggal 3 Maret 1924 parlemen Attaturk mengesahkan beberapa perundangan penting demi kelangsungan bernegara, termasuk di dalamnya adalah penghapusan khalifah, penyelenggaraan pendidikan nasional yang dimonopoli oleh negara, penutupan seluruh madrasah, sekolah imam khotib tahun 1931, dan fakultas teologi di Instambul tahun 1933. M. Amin Abdullah (1999: 193), juga memaparkan beberapa perompakan radikal Attaturk, seperti; penghapusan Peradilan Agama pada bulan April 1924 dan seluruh kelompok thareqat dibubarkan tahun 1925 dengan memberlakukan hukum Swiss tahun 1926.

Dalam bidang pendidikan, Attaturk membentuk sistem pendidikan modern yang berkarakter sekuler dengan mengadopsi secara radikal sistem pendidikan Barat. Segala yang berbau Arab berkaitan dengan kegiatan pendidikan dihapuskan, seperti pelarangan penggunaan bahasa Arab di institusi pendidikan, penghapusan pelajaran agama di sekolah, dan penutupan madrasah dan peradilan agama. Pada era 30-an, statistik pendidikan di Turki modern menunjukkan tingkat kemajuan yang dicapai, seperti; meningkatnya anggaran untuk pendidikan dari tahun ke tahun yang berimplikasi pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis masyarakat, meningkatnya jumlah siswa sekolah dasar, menengah, dan universitas. Kondisi ini terus berlanjut sampai perang dunia ke II, meskipun untuk sekolah tehnik dan kejuruan mengalami penurunan jumlah siswa.

Revolusi radikal ini terus berlanjut sampai Attaturk meninggal dunia tahun 1938. Kediktatoran memang menjadi karakter Attaturk selama masa pemerintahannya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan revolusioner yang telah dilakukannya menjadi catatan sejarah dalam proses modernisasi Turki Utsmani.

4. Pendidikan Periode Partai Demokrasi (1948-1960)

Dalam kajian Szyliowics (*Ibid*, 424), pada tahun 1950, melalui pemilihan umum pertama yang bebas, mayoritas rakyat Turki berhasil membawa Partai Demokrat ke tapuk kekuasaan. Pemilihan ini menandai titik balik dalam sejarah Turki, dari iklim negara yang diktator menuju iklim negara yang demokrasi. Pemerintah baru ini, dengan cepat memulai program pembangunan ekonomi yang memiliki signifikansi besar terhadap masyarakat Turki, khususnya bagi kemajuan sistem pendidikan.

Pemerintah menyadari arti pentingnya dukungan masyarakat desa dan berusaha keras mempertahankan keberpihakan pada warga desa yang sekian lama terabaikan oleh pemerintah tirani. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan yang memperbolehkan do'a-do'a dinyayikan kembali dalam bahasa Arab dan memasukkan kembali pelajaran agama ke sekolah. Kesadaran warga desa tentang pentingnya pendidikan modern mulai merebak di daerah Turki Timur. Pada era multi partai ini, fakultas teologi (*Illahiyat Fakultesi*) mulai dibuka kembali tahun 1949 hingga mencapai 8 fakultas yang tersebar di Ankara, Itambul, Izmir, Bursa, Konya, Samsun, dan Erzusum, demikian pula dengan Imam Khotib *School* semakin banyak di kota-kota Turki.

Pada pemilihan berikutnya tahun 1954, Partai Demokrat kembali terpilih. Menurut Szyliowics (*Ibid*, 428-488), kegagalan pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan terlihat pada periode kedua ini. Kondisi ini disebabkan tidak adanya perencanaan yang matang dan rendahnya keterlibatan *policy* pemerintah dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Misalnya; penunjukan Menteri Pendidikan, dari 4 orang tidak ada satupun berasal dari pendidikan sekolah primer, pembangunan sekolah sering berdasarkan pertimbangan politis daripada kriteria obyektif, fasilitas dan tenaga guru yang sangat kurang dibandingkan dengan jumlah sekolah yang menjamur, gaji guru yang sangat rendah daripada profesi lain, penutupan sekolah desa yang telah dibuka Attaturk, padahal sekolah ini sangat besar manfaatnya bagi warga desa, dan diperkenalkannya filsafat baru ala Amerika, sementara para praktisi pendidikan Turki sudah terdidik dengan filsafat ala Eropa.

Revolusi tahun 1960 menandai titik balik perkembangan pendidikan di Turki, sejak pemerintahan militer yang baru mengakui bahwa pendidikan adalah salah satu masalah utama negeri itu yang menjadi prioritas utama pemerintah. Menurut Szyliowics (*Ibid*, 464-495), ada beberapa program yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan, yaitu:

- a. Penerbitan laporan komisi nasional mengenai pendidikan
- b. Penyusunan program mengajar petugas cadangan untuk mengatasi kekurangan guru di desa
- c. Mengirim lulusan *Lycee*, sekolah tehnik dan kejuruan ke sekolah primer di seluruh negeri
- d. Menyediakan lapangan kerja bagi lulusan yang tidak terserap dalam korps petugas cadangan/guru cadangan.
- e. Penataan kurikulum yang lebih konteks dengan kebutuhan negara dan sosial budaya masyarakat Turki modern.
- f. Perbaikan sistem administrasi perguruan tinggi.

PENUTUP

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa dialektika historis reformasi pendidikan di Turki mengalami dinamika yang terus bergulir dari masa ke masa, dan tidak pernah lepas dari hegemoni *policy* sang penguasa. Berawal dari modernisasi sistem pendidikan masa Mahmud II yang militerisme sampai titik puncaknya masa Mustafa Kemal Attaturk dengan sistem pendidikan sekular.

Reformasi pendidikan Mahmud II dimaksudkan untuk mempertahankan otoritas kekuasaannya dengan mendirikan sekolah *Maktab-i Ma'arif* untuk menghasilkan tokoh-tokoh pembaharu yang akan menempati posisi strategis di pemerintahan. Reformasi berikutnya, masa Tanzimat dengan mendirikan Sekolah Galatasaray (*Galatasaray Lycee*) dan *Mulkiya* yang berperan sebagai agen sosialisasi gagasan dan ide-ide modern, bahkan revolusioner. Pada masa Utsmani Muda dan Turki Muda, kaum integensia gigih memperjuangkan pemerintahan konstitusi yang demokratis dengan sistem pendidikan liberalisme Barat. Pada masa Attaturk berhasil membentuk sistem pendidikan Turki modern yang berkarakter sekuler Eropa, baik pada aspek

kelembagaan maupun kurikulum. Pada masa Partai Demokrasi, dibuatlah kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada rakyat Turki dengan memperbolehkan do'a-do'a dinyayikan kembali dalam bahasa Arab, memasukkan kembali Islam dan Arab dalam kurikulum nasional, dan membuka perguruan tinggi Islam yang sebelumnya dilarang oleh Attaturk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Asmuni, Yusran. *Pengantar Studi dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hodgson, G.S. Mashall. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Vol. 3*. London: The University of Chichago Press, 1974.
- Lapidus, M Ira. *Sejarah Sosial Ummat Islam, Vol. II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhaimin dkk, *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*. Cirebon: Pustaka Dinamika, 1999.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Szylowics, S. Joseph. *Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, Terj. Achmad Jaenuri. Surabaya: Al-Ikhlas, 2001.